

**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2017
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis
Islam

Oleh :

Linda Widhiyanti

1451010070

Program Studi: Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2017
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis



Pembimbing I : Ahmad Habibi , S.E.,M.E

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan daerah Provinsi Lampung ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari 5 komponen pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dari dua jenis sector pajak tersebut berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, bagaimana realisasi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pendapatan asli daerah.

Tujuan dari penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Lampung, mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung, Serta mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data PKB dan BBNKB prov. Lampung dari tahun 2012-2017 yang diperoleh dari data sekunder BAPENDA prov. Lampung yang dianalisis dengan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pajak kendaraan bermotor dengan t_{hitung} sebesar 5.702 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar (2.015) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,005$). Sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor dengan t_{hitung} sebesar 554 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar (2.015) $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi lebih besar dari α 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan H1 diterima dan H2 ditolak artinya pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil R^2 diperoleh hasil yaitu 0,909 atau 90,9% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar persamaan. Pajak yang di dalam Islam disebut dengan *Dharabah* Yang artinya Diwajibkan Oleh Ulil amri sebagai kewajiban setelah zakat menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan *muqasid syariah* (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sector pajak.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**


Nama : **Linda Widhiyanti**
NPM : **1451010070**
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

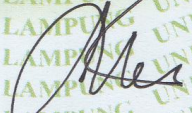
MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung,

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003


Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


Madnasir, S.E., M. Si.
NIP. 19750424200212100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2017 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG)"** di susun oleh: **Linda Widhiyanti, NPM: 1451010070,**

Jurusan **'Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal **Rabu, 07 November 2018.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : M. Yusuf Bachtiar, M.E

Penguji I : Femei Purnamasari, S.E., M.S.I

Penguji II : Suhendar, S.E., M.S.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahrudin, M.Ag

NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah (2): 188)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Edwin Hardi dan Ibu Sukenti yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terbatas serta telah ikhlas mendidik, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan, terima kasih atas semua pengorbanan baik materi maupun non-materi yang telah diberikan, dan memberikan support yang tiada hentinya serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya semoga selalu dalam indung Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adik saya Ade Nirmala Widiyanti dan Althafunnisa Mutiara Widhiyanti yang senantiasa selalu memberikan semangat dan mendoakan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama yang cukup baik maknanya yaitu Linda Widhiyanti, dilahirkan di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, pada 01 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Edwin Hardi dan Ibu Sukenti.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kaliasin tamat dan berijazah pada tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Merbau Mataram tamat dan berijazah pada tahun 2011
3. Sekolah Menengah Atas di SMANegeri 17 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2014

Kemudian di tahun 2014 penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah melalui jalur seleksi UMPTAIN.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya secara rinci ucapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Madnasir, S.E.,M.Si dan Deki Firmansyah S.E.,M.Si selaku ketua dan sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ahmad Habibi S.E.,M.E selaku pembimbing 1 yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis skripsi dapat terselesaikan.
5. Suhendar S.E.,M.S.,Ak selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis skripsi dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan pemaparan mengenai data-data yang diberikan tersebut.
8. Seluruh sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 dan terutama Ekonomi Syariah kelas D.
9. Sahabat-sahabat KKN 177 desa Penengahan Lampung selatan yang selama 35 hari selalu berbagi kisah suka dan duka.
10. Para sahabat manis manja “kosan ridho” (simay, liha, dina, resi, zizah, intan, dan ridho) yang selalu menyemangati penulis di kala senang dan sedih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Bandar Lampung, September 2018

Penulis

Linda Widhiyanti

1451010070



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah	14
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	17
B. Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25
2. Fungsi Pajak	26
3. Teori-Teori Pemungutan Pajak	28
4. Ciri-Ciri Dan Karakteristik Pajak.....	31
5. Sistem Pemungutan Pajak	31
6. Asas-Asas Pemungutan Pajak	32
7. Jenis dan Objek Pajak	33
8. Kriteria Pajak	37
9. Pajak Daerah Provinsi Lampung.....	38
C. Pajak Kendaraan Bermotor	39
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	39
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	40

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	42
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	43
5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	44
D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44
1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	44
2. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45
3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	46
E. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak	48
F. PenelitianTerdahulu	60
G. KerangkaPemikiran.....	61
H. Hipotesis	61
 BAB III METODE PENELITIAN	 68
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	68
B. Sumber Data.....	69
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	70
D. Definisi Variabel Penelitian.....	71
E. Analisis Data.....	72
F. Uji Asumsi Klasik.....	72
G. Uji Hipotesis.....	75
 BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN	 77
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	77
2. Tugas pokok dan fungsi BAPENDA provinsi Lampung	78
3. Visi dan Misi BAPENDA	84
4. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung	84
5. Struktur Organisasi BAPENDA.....	87
6. Analisis Deskriptif	88
B. Analisis Data Penelitian.....	92
1. Uji Normalitas.....	92
2. Uji Regresi Linear Berganda.....	96
3. Uji Hipotesis.....	97
4. Koefisien Determinasi.....	99
C. Pembahasan	99
1. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	99

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	103
----------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Periode 2012-2017.....	6
Tabel 1.2	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2012-2017	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	57
Tabel 4.1	Layanan Unggulan Samsat.....	83
Tabel 4.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.....	88
Tabel 4.3	Target Dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Ken- daraan Bermotor Provinsi Lampung 2012-2017	90
Tabel 4.4	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.....	91
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	92
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	94
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas	94
Tabel 4.9	Hasil Uji Linear Berganda	95
Tabel 4.10	Hasil Uji T.....	96
Tabel 4.11	Hasil Uji F	98
Tabel 4.12	Hasil Uji Determinasi.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	61
Gambar 4.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2012-2017	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Pembimbing Akademik
Lampiran 2	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 3	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 4	Surat Riset Penelitian Skripsi
Lampiran 5	Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor Dan Pendpaatn Asli Daerah Tahun 2012-2017
Lampiran 6	Data Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menunggak Per 31 Desember 2017
Lampiran 7	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung 2012-2017
Lampiran 8	Komponen Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Lampung Tahun 2012-2017
Lampiran 9	Hasil Analisis Berganda
Lampiran 10	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 11	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 12	Hasil Uji Heteroskedasitas
Lampiran 13	Hasil Uji Autokorelasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, Disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Realisasi

Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu rencana menjadi perwujudan nyata.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia, 2011), hlm.1045

3. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara.²

4. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor ialah kendaraan roda dua atau lebih yang digunakan di darat untuk angkutan barang dan atau orang yang digerakkan oleh motor atau mesin.³

5. Bea balik nama kendaraan

Bea balik nama kendaraan adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.⁴

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lainya.⁵

²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Jakarta: Andi Offset, 2013) hlm 1

³Kunarjo, *Glosarium Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003) hlm 227

⁴Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Cikal Sakti, 2007) hlm 39

⁵Kosasi, Eva Maria S Dan Abdul Yusuf, *Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang*, *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol. 11 Edisi 24 Sep-Nov 2012, hlm 12

Berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menentukan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.⁶

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi berkesinambungan dari tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Lampung Periode 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdapat 5 (lima) komponen pajak daerah dalam lingkup provinsi Lampung, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

⁶Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

⁷Mustafa Edwin Nauton, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta :kencana,2007) hlm16

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat membantu peningkatan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Dalam hal ini pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu melakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian *diskresi* dalam penentuan tarif. Kemudian dari 5 komponen pajak daerah di atas terdapat dua sub sector pajak yang cukup memberikan kontribusi lebih pada pendapatan asli daerah yaitu dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan hal tersebut, maka inilah alasan peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung.

2. Alasan subyektif

Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tempuh yakni jurusan Ekonomi Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penulis optimis penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan mengingat tersedianya

dari literatur yang dibutuhkan baik tersedia di perpustakaan maupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan.

C. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan perimbangan dan hasil lain-lain yang sah.⁸

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola pemerintah Lampung adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik

⁸Luh dina ekasari dan febian akbari, *Tingkat efektifitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah* (studi pada UPT dinas pendapatan provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota) Malang : universitas tribhuwana tunggadewi , 2017

nama kendaraan. Dalam pelaksanaannya pemungutannya di bantu oleh beberapa kantor cabang di berbagai wilayah provinsi Lampung

Dengan pemberian kemudahan-kemudahan pembelian kendaraan bermotor tidak membuat tingkat konsumtif dari masyarakat akan semakin meningkat, hal ini terbukti dengan data yang ditunjukkan dari instansi kepolisian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia terutama di provinsi Lampung mengalami penurunan di setiap tahunnya, yakni berikut data jumlah kendaraan bermotor di provinsi berdasarkan jenisnya:

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung
Periode 2012-2017

Tahun	Jenis Kendaraan					Jumlah
	Mobil Penumpang	Mobil Barang	Mobil Bus	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	
2012	14.347	12.244	231	223.461	52	250.353
2013	16.647	10.272	8	184.403	48	211.378
2014	17.071	9.967	27	191.871	18	218.900
2015	15.591	9.206	68	155.497	23	180.385
2016	19.135	6.515	117	125.551	43	150.925
2017	18.890	7.689	128	120.439	45	147.281
Total	101.717	55.893	579	1.000.786	229	1.159.204

Sumber: Ditlantas Polda Lampung, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan beragam jenis di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 terhitung sebanyak 250.335 unit kendaraan bermotor, kemudian turun menjadi menjadi 211.378 unit pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor di Lampung turun lagi menjadi 218.900 unit, tahun 2015 sebesar 180.385 unit kemudian di tahun 2016 sebesar

150.925 unit dan terakhir di tahun 2017 147.281 unit. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa dengan beragam kemudahan sarana transportasi saat ini masyarakat cenderung mulai mengurangi sifat konsumtifnya terhadap pembelian kendaraan.

Tabel 1.2

**Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Jumlah (A+B+ C+ D)
	Pajak daerah (A)	Retribusi Daerah (B)	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (C)	Lain-lain PAD yang sah (D)	
2012	1.465.711.124.584	8.190.683.392	21.270.703.774	210.958.891.774	1.706.131.403.524
2013	1.547.336.214.795	10.070.270.933	25.144.918.795	199.528.538.679	1.782.079.943.203
2014	1.946.452.924.019	9.253.336.152	25.462.864.859	326.734.975.025	2.307.904.100.056
2015	1.963.322.716.952	10.334.830.095	25.715.957.117	247.915.175.650	2.247.288.679.813
2016	2.051.836.519.458	7.009.465.984	26.696.866.021	279.554.362.507	2,365.097.213.971
2017	2.451.339.713.997	7.322.619.001	27.522.159.554	273. 674.684.101	2.759.859.176.654

Sumber: Buku Saku Target Dan Realisasi Pendapatan, 2012-2017

Dengan melihat sajian data di atas dengan memperhatikan sektor potensi yang ada maka, komponen pendapatan asli daerah tersebut yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan pembiayaan pembangunan daerah. Komponendari sector pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar di tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.451.339.713.997dan menjadikan penerimaan pendapatan asli daerah tertinggi selama 6 tahun terakhir yakni sebesar Rp. 2.759.859.176.654.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya

untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang lain, yang ingin dicapai oleh negara.⁹ Pemungutan pajak sendiri telah tercantum dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat (9); 29:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah,¹⁰ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.¹¹*

Tafsir pada ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan persoalan ahli kitab, yaitu kaum yahudi dan nasrani. Dimana makna dari ayat ini adalah Allah memerintahkan memerangi orang-orang yang tidak berbuat empat perkara yaitu: 1). Mereka yang tidak beriman kepada Allah, dalam Al-qur'an menyatakan bahwa orang yahudi dan nasrani telah kehilangan keimanan itu dengan merusak asasnya, yaitu tauhid. 2). Mereka tidak beriman kepada hari kemudian. 3). Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. 4). Mereka tidak beragama dengan agama yang

⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali pers; 2010) hlm 31

¹⁰Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2013) at-taubah (9) :29, hlm 193

benar.¹² Adapun ahli kitab oleh karena sedikit banyaknya mereka itu orang yang beriman kepada Allah dan rasul, maka kepada mereka diberikan sedikit kelonggaran yaitu boleh tetap dengan agamanya mesti membayar *jizyah* dan menagaku tunduk terhadap hukum-hukum Islam, memuliakan Islam dan tidak menghinakannya. Abu hanifah, Tsauri, Syafi'i ahmad dan Abu saur berkata pemabayaran *jizyah* hanya boleh diterima oleh ahli kitab.

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari pemungutan pajak digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak mengandung prinsip keadilan dimana merupakan pilar dalam ekonomi Islam yang bertujuan menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan dapat memicu timbulnya konflik yang berdampak pada terganggu pembangunan perekonomian di wilayah.

Pemerintah melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dimana sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu.

¹² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Edisi Pertama, Cetakan Ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006) hlm 483

Selain itu, terdapat sejumlah penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan tentang pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa wilayah Indonesia, seperti pada Kabupaten Pidie, Aceh. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie, dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,776.¹³ Namun, di beberapa wilayah di Indonesia pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap PAD seperti pada penelitian yang dilakukan di Sumatera Selatan dan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah. Perbedaan yang terdapat dari beberapa penelitian tersebut adalah bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan akan memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan keefektifitasan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh realisasi pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) periode tahun 2012-2016 di provinsi Lampung. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** ”

¹³Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad II “*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie*” (Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala)

provinsi Lampung Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan Masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Apakah realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) provinsi Lampung?
2. Apakah realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) provinsi Lampung?
3. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pendapatan asli daerah provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) provinsi Lampung

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) provinsi Lampung
3. Mengatahui pandangan ekonomi islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pendapatan asli daerah provinsi Lampung

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemerintahan daerah terutama mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah didapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya konsentrasi dibidang akuntansi perpajakan, selain itu penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan tentang bidang administrasi perpajakan daerah provinsi Lampung. Selain itu, juga dapat menambah kepustakaan dibidang perpajakan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi lampung khususnya Badan pendapatan

daerah provinsi Lampung dalam mengimplemetasikan kebijakan peraturan daerah No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih optimal.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai segala macam dari tujuan pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁴

Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendanaan melalui pemerintah pusat yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.¹⁵

¹⁴Ruby Bahrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN ,2011) hlm

¹⁵E. Piterdono, HZ, *Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012-2016*, (Bandar Lampung: BAPENDA, 2017) Hlm, 1

Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai keperluan belanja daerah dan pembangunan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Besar kecilnya PAD bagi suatu daerah sangat tergantung pada dua instrumen umumnya, yaitu pajak dan retribusi daerah yang juga sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian di daerah bersangkutan. Pada dasarnya PAD dapat dijadikan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam kegiatan pembiayaan pembangunan. Dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar tingkat kemandirian daerah tersebut dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat, begitupun sebaliknya semakin rendah PAD suatu daerah maka semakin tidak mandiri suatu daerah bersangkutan dalam membiayai pembangunan di daerahnya dan semakin bergantung terhadap pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan meliputi berbagai

sektor misalnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Sumber dana yang berasal dari dalam pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah yang merupakan hasil dari pajak dan retribusi daerah, laba bersih perusahaan daerah dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan yang berasal dari luar daerah terutama dalam bentuk perimbangan yang berasal dari pemerintah nasional (APBN). Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pajak sumber daya alam..

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah , yaitu pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pendapatan asli daerah yaitu, sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶ Pajak daerah terdiri dari 2 bagian yaitu:

1) Pajak provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

¹⁶Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2) Pajak kabupaten/kota

- a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak penerangan jalan
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g) Pajak parkir
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung walet
 - j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan,
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:¹⁷

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha

Retribusi Perizinan Tertentu

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.

¹⁷Mardiasmo, perpajakan edisi revisi (jakarta: andi yogyakarta . 2008) hlm 14

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

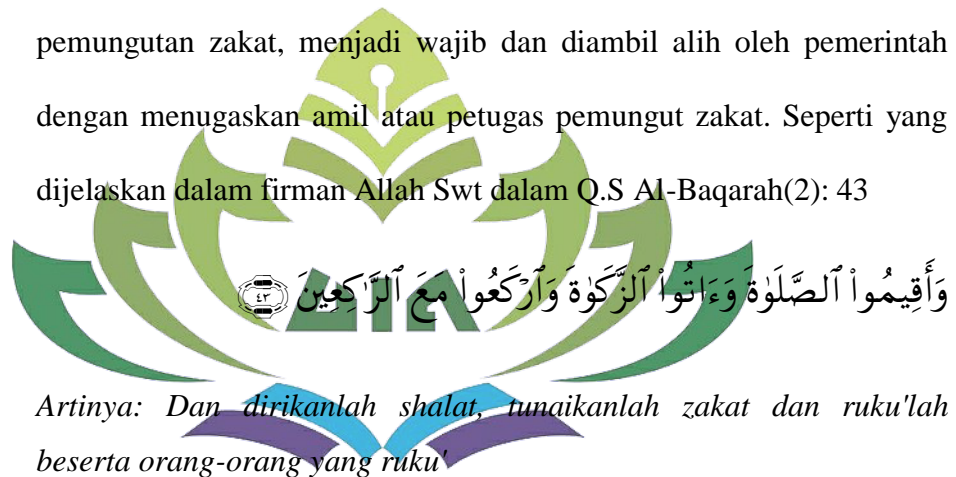
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

Sedangkan pada masa Islam pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat ters merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang berstandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah pemungutan zakat, menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut zakat. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah(2): 43



b. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah dimana ilayah yang ditaklukan harus membayar kepada negara Islam. Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim, kharaj pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah(pajak proporsional)yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata terlepas dari seorang tersebut muslim atau non-Muslim. Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan penetapan daerah (*zoning*) hal

ini berarti bahwa bias jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi lain tanah ditanami kurma di sisi lain di tanami anggur maka mereka harus membayar jumlah kharaj yang berbeda. Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.s Al-Baqarah (2):

267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

c. Khums

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan khums bukan hanya rampasan perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Pengenaan pajak barang tambang dan galian diterapkan agar penambang tidak semena-mena dalam melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dimuka bumi ini.

Seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Q.S Al- anfaal (8): 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

d. Ghanimah

Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin, disebut ghanimah jika diperoleh dengan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak dan mengepung.¹⁸ Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam di periode awal. Tertuang dalam dasar perintah Allah Swt dalam QS. Al-Anfal (8): 41, yang turun di badar setelah usai perang badar.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾﴾

Artinya: ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,

¹⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi (Bandung; Raja Wali Pers , 2011) hlm, 78

kerabat Rasul anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqaan , yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

e. Fay'i

Fay'i artinya mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum fay'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay'i digunakan untuk harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah, maupun pajak yang dikenakan atas tanah tersebut (kharaj). Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, untuk kebaikan masyarakat umum. Harta fay'i menurut Al- Ghazali disebut dengan *anwal almashalih*, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.¹⁹ Fay'i disyariatkan melalui firman Allah dan atsar adapun firman Allah Swt dalam Qs. Al-hasyr (59): 6-7.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang berikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) mereka. Maka untuk mendapatkan itu kamu

¹⁹Gusfahmi, *ibid*, hlm 103

tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu (6). apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada allah. sesungguhnya allah amat keras hukumannya.(7)

f. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalin agama mereka masing-masing.²⁰ Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan ajib diambil setelah melewati satu tahun serta tidak wajib sebelum satu tahun. Dasar dari diperintakkannya jizyah adalah berdasarkan Q.S At- taubah (9): 29 yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

²⁰Gusfahmi, *ibid*, hlm 104

B. Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undnag-undang republik indonesai No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Terdapat definisi lain tentang pajak yakni pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara.²²

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan menurut beberapa ahli, namun pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama.

Menurut Prof. Dr. PJ.A. Adriani, bahwa pajak adalah iuran kepada negaara)yang dpaat diapaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

²¹Liberti pandiangan, *Administrasi Perpajakan , pedoman praktis bagi wajib pajak diindonesia* (surabaya: Erlangga, 2014) hlm, 4

²²Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi (jakarta: andi offset , 2011) hlm 1

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²³

Menurut Djajadiningrat pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekeayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadilan, terus kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁴

Menurut Veldmann pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.²⁵

Dari pengertian diatas terlihat adanya kontribusi seorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

2. Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi utama yaitu:²⁶

²³ibid, hlm 3

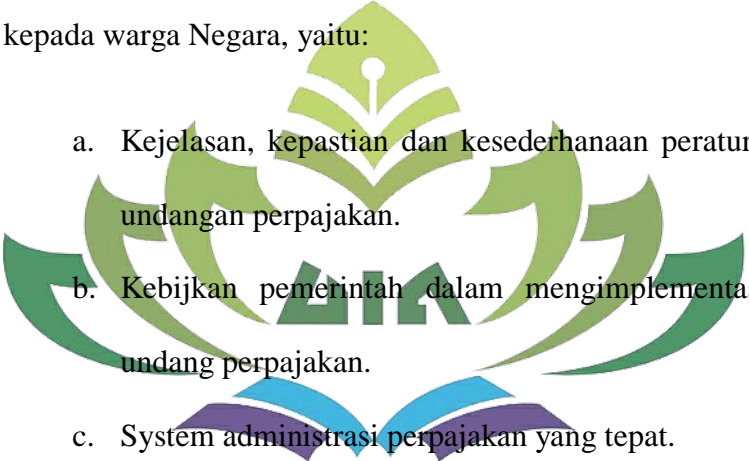
²⁴Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2010) hlm

²⁵Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Edisi 11* (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hlm 11

²⁶Mardiasmo, *Perpajakan*, 2008, hlm 1

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Terdapat beberapa factor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, yaitu:

- 
- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
 - c. System administrasi perpajakan yang tepat.
 - d. Pelayanan.
 - e. Kesadaran dan pemahaman warga Negara.
 - f. Kualitas petugas pajak (intelektual keterampilan integritas, dan moral tinggi).

2) Fungsi mengatur

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Teori Pemungutan Pajak

1) Teori asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan). Sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi. Namun teori asuransi ini, bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap warga negara, tidak sekedar kepada masyarakat pembayar pajak saja. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dari teori asuransi sehingga teori ini

kehilangan penganut.²⁷ Misalnya jika seseorang meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pemabayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.

2) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Di dalam Teori ini makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga besr pajaknya. Meskipun teori ini masih berlaku namun sukar untuk mempertahankan karena orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah yang banyak sekali menikmati jasa dari pemerintah, tetapi justru mereka tidak membayar pajak. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yaitu dalam bentuk perlindungan atas jiwa dan harta benadanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul

²⁷Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010) Hlm5

oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar teori ini adalah rasa keadilan yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melebihi pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.

4) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bukti

Teori ini berlawanan dengan teori yang sebelum-sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Pada teori berdasarkan paham *organische staatleer* yang menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak.

5) Teori Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu namun kepentingan negara. Teori ini lebih cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur (*regulerend* atau *repricing*) dari pemungutan pajak.

4. Ciri Dan Karakteristik Pajak

- a. Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih teradapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:²⁸

- a) *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

²⁸Mardiasmo, loc.cit 2011hlm 15

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Asas-asas pemungutan pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *Equaity*

Pemungutan pajak harus bersifat asli dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Cetainty*

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin demikian pula yang ditanggung wajib pajak.

7. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan sebagai alat angkut orang atau barang. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan negara internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak

kendaraan bermotor. Kemudian yang subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah kedutaan dan konsulat asing. Sebagai subjek wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu merupakan penyerahan yang pertama.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi, yang menjadi objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan kendaraan bermotor. Subjek pajak adalah konsumen

bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagai wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota setelah dikurangi 10% nya untuk pemerintah provinsi yang bersangkutan. Bagian yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar 90% dari hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tadi dibagi lagi yaitu 50% diteruskan kepada daerah kabupaten berdasarkan panjang jalan di masing-masing kabupaten dan sisanya 50% lagi dibagi rata untuk seluruh daerah kabupaten yang ada di provinsi yang bersangkutan.

d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Kemudian karena sumber daya air bawah tanah dan air permukaan biasanya tersebar di beberapa wilayah tingkat II maka baik pemerintah pusat maupun daerah tingkat satu tetap berwenang mengatur organisasi pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok dikenakan kepada pengusaha oleh pabrik rokok atau produsen dan termasuk pula importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemungutan adalah pemerintah daerah, dimana proses pemungutan pajak rokok secara bersamaan disertai dengan pemungutan cukai rokok. Di beberapa tempat di Indonesia hadirnya perusahaan rokok mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk pemerintah daerah, sehingga dengan melihat potensi tersebut dibutuhkan pemungutan dan penyetoran pajak agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan terarah.

b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengabilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir
8. Pajak sarang burung walet.

8. Kriteria pajak daerah

Berkaitan dengan pembagian kewenangan penarikan pajak pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terdapat kriteria berkaitan dengan pemberian kewenangan perpajakan baik wewenang pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. Basis pajak daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beba pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” pajak akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (pusat/provinsi).
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.
- d. Pajak daerah harusnya “visible” dalam arti pajak harus jelas bagi pembayar pajak daerah, objek ,subjek, dan besarnya pajak terutang mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pemabayar

pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).

- f. Pajak daerah harusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif lebih mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum dan komputerisasi.

9. Pajak daerah provinsi lampung

Sesuai dengan peraturan daerah provinsi Lampung No. 5 tahun 2018, pemerintah provinsi Lampung melaksanakan pemungutan pajak terhadap 5 (lima) jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan provinsi Lampung tersebut, yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam pendanaan pembiayaan daerah

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga termasuk alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh gross tonnage).²⁹

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek dan subjek pajak kendaraan bermotor berdasar pasal 4 undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan

²⁹ Peraturan Daerah provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 4

instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor, dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya dan /atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebab, ada beberapa pengecualian yaitu:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan /atau dikuasai kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasi Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- d. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) peraturan daerah ini dapat menyatu yaitu satu peraturan daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Kendaraan Atas Air (KAA).
- e. Ketentuan Gubernur Yang Mengatur Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah atas pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air pada provinsi tersebut. Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu yaitu suatu keputusan Gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan atas air juga dapat dibuat terpisah

misalnya keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan keputusan Kendaraan Atas Air.

3. Dasar Pengenaan PKB

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil hitung perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:

a) Nilai Jual

Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data) seperti agen tunggal, asosiasi penjual kendaraan bermotor atas suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Isi silinder dan atau satuan daya
2. Penggunaan
3. Jenis
4. Merek tahun pembuatan berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
5. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotr tertentu.

b) Bobot

unsur bobot dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tekanan ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.

2. Jenis bahan bakar yang dibedakan antara lain; solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan antara lain jenis 2 tak, 4 tak, dan mesin 1000 cc atau 2000 cc.

4. Tarif pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
 3. 0,5% Untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah, TNI/POLRI dll
 4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan

seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih ditetapkan sebagai berikut :

- a) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- c) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%.

5. Perhitungan pajak kendaraan bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak PKB terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang dimaksud dengan bea balik nama dalam hal ini adalah merubah kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan yang baru. Maka yang menjadi objek pajaknya adalah penyerahan kendaraan bermotor

termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di indonesia kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan
2. Untuk diperdagangkan
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia kecuali selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
4. Digunakan untuk pameran, penelitian contoh untuk kegiatan bertaraf internasional.

Pelaksanaan proses bea balik nama kendaraan di kantor pelayanan samsat setempat dengan melengkapi persyaratan bea balik nama sekaligus perpanjangan STNK atas nama perorangan dalam suatu wilayah kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. BPKB
- b. STNK
- c. Kwitansi pembelian
- d. KTP pemilik baru
- e. Cek fisik kendaraan

2. Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB

Adapun dasar hukum pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor antara lain:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotr.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan BBNKB

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung sebagai dari dua unsur pokok yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kada kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20%
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- b. Untuk kendaraan bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebesar 15% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

- c. Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 atau lebih sebesar 12,5% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- d. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- e. Untuk kendaraan bermotor angkutan barang sebesar 7,5% dikalikan 80% Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- f. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance* pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan instansi pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- g. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance* pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan instansi pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- h. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0.75% dikalikan 40% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dan untuk perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

E. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁰

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.³¹

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.³² Sedangkan pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut

³⁰ Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet, II Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Jilid II) N Hukum zakat, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, Cet. V, 1999) hlm, 998

³¹ Gazy Inayah, *Al-Iqtishad Al Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Cet.1, 2003) hlm 24

³² Santoso, *pengantar ilmu hukum pajak, pustaka bandung bab dharabah*, hlm 815

dengan *Dharabah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan dan membebaskan.³³

Seperti yang telah dikemukakan oleh Zallum tentang definisi pajak menurut syariah, yang didalamnya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh karena Allah Swt.
- b. Objeknya harta
- c. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-muslim
- d. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus ditaasi oleh ulil amri (pemerintah).

Kelima unsur dasar tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan Non-Muslim.

³³A. W Munawwir, Kamus Al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012) Hlm 830

- c. System pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh ulil amri atas kewajiban tambahan sesudah zakat (*dharabah* bukan zakat) karena kekosongan atau keurangan baitul mal, jika keadaan baitul mal sudah terisi kemabali diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, buakn kepentingan umum. Dan di dalam al-qur'an hanya ada satu kali saja kata "Pajak" yaitu dalam terjemahan al-qur'an dalam surat At-Taubah (9): 29 dimana kata pajak adalah terjemahan dari kata *jizyah*.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Menurut Islam Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur dan melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan secara individu. Intervensi pemerintah dalam masalah-masalah perekonomian terdapat dalam al-qur'an surat An-nissa (4): 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu dimbnagi dengan peningkatan prasaran dan sarana public yang dapat menunjang kegiatan perekonomian dengan sifat barang public yang *non rivalry* ialah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga menikmati barang public tersebut dan *non-exclusion* yaitu apabila barang public itu tersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Masing-masing individu akan cenderung *free rider* yang berarti untuk mereka yang ikut menikmati barang public tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya jalan raya, salah satu barang

public yang banyak penggunaannya tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut (*non-rivalry*) dan semua orang berhak menikmati manfaat dari jalan raya dan sebagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan untuk alokasi perbaikan jalan raya karena orang yang membayar dapat menikmati jalan tersebut begitupun dengan orang yang tidak membayar pajak juga dapat menikmatinya (*non-excludable*) tanpa mengeluarkan kontribusi di dalamnya.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk lalu lintas barang, dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan impor. Disamping itu peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu harus adil dan harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Equality (kesamaan dalam beban pajak)
- b. Certainty (kepastian hukum)
- c. Convention of payment
- d. Economic of collection

Selain perluasan pajak dalam peraturan daerah ini juga terdapat perluasan terhadap beberapa objek pajak. Dalam undang-undang No. 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah hanya diberikan wewenang untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Untuk menghindari

pernag tarif antar daerah maka objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor dalam peraturan ini ditetapkan tariff minimum.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar, Karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Sejalan dengan tidka memberi kewenangan kepala daerah untk menetapkan pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada saatnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam

Kewajiban utama atas harta adalah zakat maka landasan teori pajak harus mengacu pada zakat, dengan demikian dua kewajiban ini tidak boleh berada dalam satu posisi yang sama besarnya, melainkan satu dengan yang lain adalah saling melengkapi dengan konsekuensi bahwa pajak dapat ditunaikan setelah zakat. Menurut qardhawi, asa teori wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Teori beban umum

Teori ini didasarkan bahwa hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa aja yang dikehendakinya baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajiban dan tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk menguji apa yang ada di hati mereka, agar Allah membersihkannya juga agar Allah mengetahui siapa yang taat

kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik mana yang jahat dan mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka, sedang mereka tidak dianiaya.³⁴

b. Teori khilafah

Teori pajak ini menyatakan bahwa harta adalah amanah Allah Swt. Teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah Swt dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu.³⁵ Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah. Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat Thaaha (20): 6

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*

c. Teori Pembelaan Antara Pribadi Dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya memeberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.³⁶ Firman Allah Swt dalam surat .(QS. An-nissa (4): 29

³⁴ Ibid, hlm 173

³⁵ Ibid, hlm 174

³⁶ Ibid, hlm 175

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,³⁷ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

d. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh islam ada dua macam atau dua tingkatan yitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda dan berbeda pula tingkat dan derajatnya, namun berasal dari satu turunan yaitu dari satu ayah.

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Diantarauntutannya ialah janganlah manusia mau hidup senang sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia.³⁸

3. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memangdiwajibkan ata mereka(kaum muslimin) pada saat

³⁷Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

³⁸Gusfahmi, loc.Cit hlm 176

kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memenag sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.

Menurut Zallum ada 6(enam) jenis pengeluaran yang biayai oleh pajak seperti:

- a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentuka dan pelatihan pasukan; pengadaan senjata; dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengemabangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim guru, dan semua pegawai Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- e. Pembiayaan atas pengadaaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkana bahaya bagi umat. Adapun jika untuk menambah yang sudah ada dan jika tidak dilakukan tidak menyebabkan bahaya maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.
- f. Pembaiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, smentara harta di baitul mal tidak ada atau,kurang.

Oleh karena itu pajak itu adalah amanah rakyat, menurut al-maliki ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebagai bahan tinjauan penulis dan sebagai bahan perbandingan dan kajian oleh penulis. Adapun hasil-hasil penelitian berikut yang dijadikan bahan perbandingan yang tidak terlepas dari penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Periode 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan judul	Kasus	Hasil penelitian
1	Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo dan Rita Andini	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Cukai Kendaraan dan Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar sekaligus mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini karena tingkat signifikansi dalam Anova $0,000 < 0,05$. Sedangkan hasil perhitungan uji T setiap variabel independen menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

			<p>Bermotor pengaruh signifikan terhadap Pendapatan dan Daerah Pabean periode tahun 2008-2014 Kendaraan tidak berpengaruh pada periode pendapatan asli 2008- 2014, Dan semua variabel ini secara bersamaan mempengaruhi pendapatan lokal.</p>
	<p>Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad II</p>	<p>Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie, dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,776.</p>
	<p>Margaretha anggraini, anton arisman dan chritina yunita</p>	<p>Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012- 2014</p>	<p>Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Variabel(PKB) Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sedangkan Untuk Variabel (BBNKB) Tidak Mempunyai Pengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Secara Simultan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014.</p>
4	<p>Ratnasari Tibertius Nempung dan La</p>	<p>Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan</p>	<p>Variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah kendaraan masuk</p>

	Ode Suriadi	Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	positif dan secara statistic signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
5	Surya Rahayuanty, Lewi Malisan dan Anisa Kusumawardani	Analisis target dan realisasi pajak daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur meningkat pada tahun 2009-2014, dan menurun pada tahun 2015-2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 109%. Sedangkan persentase realisasi dari masing-masing jenis penerimaan pajak daerah adalah: pajak kendaraan bermotor sebesar 105%; perubahan pajak kendaraan bermotor 104%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 110%; pajak air permukaan 105%; dan pajak rokok sebesar 96%.
6	Ira Anggrainy David	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Study Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak	Hasil penelitian yang dilakukan adalah terdapat pengaruh yang positif antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil koefisien korelasi berganda didapat $r = 0,921$ nilai mendekati 1 artinya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang

		Provinsi DKI Jakarta	sangat kuat dengan pendapatan asli daerah, dan didapat koefisien determinasi (KD) sebesar 0,971 atau 97,1% yang berarti variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Demikian pula signifikansi uji t dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan pada signifikansi uji F diperoleh hasil $F_{hitung} = 153,392 > F_{tabel} = 4,74$. H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah
--	--	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menguji ulang dari beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan menambahkan dalam perspektif ekonomi islam.

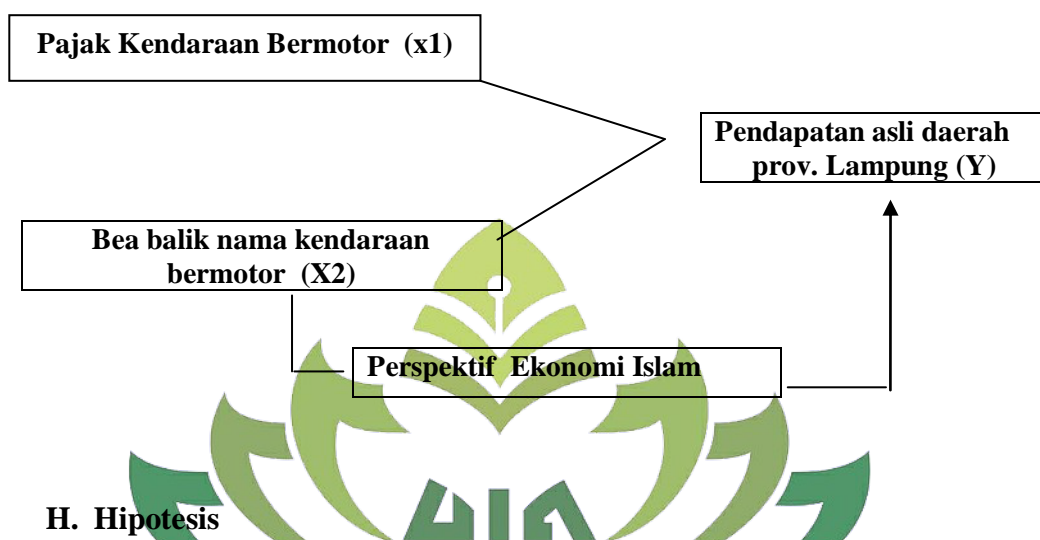
G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui yang mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi Lampung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai variabel independen dan variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen,

Penelitian ini mencoba menganalisis seberapa besar pengaruh realisasi berdasarkan dari pernyataan di atas, latar belakang masalah, dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



H. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y dimana variabel nol (H_0) yaitu suatu hipotesa tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) merupakan hipotesa yang diajukan peneliti dalam penelitian ini masing-masing hipotesa tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial

Berdasarkan penelitian Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Dan Christina Yunita yang berjudul “ Pengaruh Penerimaan Paja Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan”, Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2014.³⁹

Menurut ratnasari, Tiberitus Numpeng dan La Ode Suriadi yang berjudul “ analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi tenggara” hasil penelitian menunjukkan Variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah kendaraan masuk positif dan secara statistic signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsis Sulawesi tenggara sedangkan variabel tunggakan pajak kendaraan bermoto tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.⁴⁰

³⁹Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Dan Christina Yunita yang berjudul “ *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumate ra Selatan* (Palembang: STIE MDP, 2014) Hlm 10

⁴⁰Ratnasari, Tibertius Numpeng Dan La Ode Suriadi “ *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*” Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 (2016) hlm 93

Menurut Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo dan Rita Andini yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.” Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Cukai Kendaraan dan Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar sekaligus mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini karena tingkat signifikansi dalam Anova $0,000 < 0,05$. Sedangkan hasil perhitungan uji T setiap variabel independen menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pabean periode tahun 2008-2014. Kendaraan tidak berpengaruh pada periode pendapatan asli 2008-2014, dan semua variabel ini secara bersamaan mempengaruhi pendapatan lokal.⁴¹

Menurut Ira Anggrainy David Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Study Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Hasil penelitian yang dilakukan adalah terdapat pengaruh yang positif antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap

⁴¹Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo dan Rita Andini yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah” (Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016) hlm 62

pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil koefisien korelasi berganda didapat $r = 0,921$ nilai r mendekati 1 artinya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan asli daerah, dan didapat koefisien determinasi (KD) sebesar 0,971 atau 97,1% yang berarti variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Demikian pula signifikansi uji t dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan pada signifikansi uji F diperoleh hasil $F_{hitung} = 153,392 > F_{tabel} = 4,74$. H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_0 : Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

H_1 : Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

Ho: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

H2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.

2. Pengaruh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan

Menurut Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad II yang berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie” Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Cukai Kendaraan dan Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar sekaligus mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini karena tingkat signifikansi dalam ANOVA $0,000 < 0,05$. Sedangkan hasil perhitungan uji T setiap variabel independen menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan dan Daerah Pabean periode tahun 2008-2014. Kendaraan tidak berpengaruh pada periode pendapatan asli 2008-2014,

Dan semua variabel ini secara bersamaan mempengaruhi pendapatan lokal.⁴²

Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Dan Christina Yunita yang berjudul “ Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan”, Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2014.

Menurut Surya Rahayuanti, Lewi Malisan dan Anisa Kusumawardani yang berjudul “Analisis target dan realisasi pajak daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur meningkat pada tahun 2009-2014, dan menurun pada tahun 2015-2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 109%. Sedangkan persentase realisasi dari masing-masing jenis penerimaan pajak daerah adalah: pajak kendaraan bermotor sebesar 105%; perubahan pajak kendaraan

⁴²Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad II “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie” (Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala) hlm 72

bermotor 104%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 110%; pajak air permukaan 105%; dan pajak rokok sebesar 96%.⁴³

Berdasarkan penelitian diatas tentang pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ho: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2012-2017 secara simultan.

H3: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2012-2017 secara simultan.

⁴³Surya Rahayuanti, Lewi Malisan dan Anisa Kusumawardani yang berjudul “*Analisis Target Dan Realisasi Pajak Daerah*” (<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>) hlm 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan atau mendapatkan penjelasan mengenai besarnya kebermaknaan dalam model yang dihipotesakan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan⁴⁴. Metode penelitian kuantitatif adalah sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.⁴⁵ selain itu penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan banyak angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran dengan angka-angka tersebut, serta sampai hasil akhirnya.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara

⁴⁴Rully Indrawan, Poppy Yaniwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm 141

⁴⁵Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (BANDUNG: Alfabeta, 2014,) hlm 7

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁶

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Lampung periode tahun 2012-2017 menurut perspektif ekonomi Islam. Selain itu penulis menggunakan kepustakaan guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data ini diperoleh baik dari buku, dokumen, catatan, literatur ataupun laporan hasil terdahulu analisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari studi pustaka. Adapun wujud dari data

⁴⁶Sunadi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (jakarta: raja grafindo persada, 2011) hlm 22

sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini adalah data jumlah realisasi pendapatan Asli daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan beberapa data lainnya yang sangat terkait dengan tema penulisan penelitian yang didapati dari Badan Pendapatan Daerah provinsi Lampung selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah provinsi lampung.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalis asli yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi semua data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Lampung periode tahun 2012-2017, wawancara dengan indikator pajak, asas-asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, *self assesment system* dan unsur-unsur pemungutan pajak

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan dijadikan sampel yaitu semua data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor di provinsi Lampung periode 2012-2017 dengan pertimbangan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak utama setelah pajak lainnya. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu.⁴⁷

D. Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel terikat (variabel dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah provinsi Lampung. Untuk mengukur PAD suatu daerah menggunakan indikator yakni dengan menjumlahkan semua yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

2. Variabel bebas (variabel independen)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dari tahun 2012-2017 di provinsi Lampung.

⁴⁷Sugiyono, opcit hlm 85

E. Alat Analisis Data

Teknik alat analisis data penelitian adalah menggunakan model regresi linear berganda. Regresi linear adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel dengan satu variabel lain. Sedangkan regresi linear berganda ialah membandingkan antara satu variabel bebas dengan satu buah variabel terikat, mengolah data menggunakan program SPSS persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Y = Pendapatan Asli Daerah
 a = konstanta / Koefisien
 b = koefisien regresi
 X1 = Penerimaan PKB
 X2 = Penerimaan BBNKB

F. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka peneliti ini menggunakan analisis regresi linear untuk membandingkan dua variabel yang berbeda

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini akan

menggunakan program SPSS dengan pengujian metode one sample kolmogorov smirnov dengan tingkat spesifikasi atau *level signification* (α) sebesar 0,05% adapun hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Ho : Data Terdistribusi Normal (Ho Diterima)

Ha : Data Tidak Terdistribusi Normal (Ho Di Tolak)

Dasar pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan Ho adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.sig.(2-tailed)* > *level of significance* (α) (0,05)

Ho ditolak jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.sig.(2-tailed)* \leq *level of significance* (α) (0,05)

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit mendapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Apabila VIF

kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi (hubungan) antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode yang digunakan adalah dengan melihat uji Durbin-Watson (uji DW).

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan beberapa metode yaitu melalui Uji Glejser dan Uji Spearman's rho. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji Glejser untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas.

G. Uji Hipotesis

1. Uji t (parsial)

Uji statistik T atau uji parsial merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen, dimana yang menjadi variabel independen merupakan program pemutihan dan pendpaatan asli daerah

(PAD) yang menjadi variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengelolaan data melalui program SPSS statistic parametrik sebagai berikut:

1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

2. Uji F (simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak/simultan. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat *sig* α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika nilai *sig* $< \alpha$ maka H_0 ditolak

b. Jika nilai *sig* $> \alpha$ maka H_0 diterima

3. Koefisien Determinasi

Pada model linear berganda ini akan dilihat besarnya pengaruh untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2) jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi (R^2) makin

mendekati nol (0) maka semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung”. Waktu pembentukannya bersamaan dengan Dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I lampung pada bulan maret 1964. Pada tahun 1968 bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “biro” Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan surat keputusan gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Dengan surat keputusan Gubernur No. Des/0254/B. VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya dengan surat keputusan Gubernur No. G/163/dp/hk/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan surat keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 maret 1978 yang kemudian diralat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi di seluruh organisasi dan tata kerja kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 14 tahun 1976. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 pemerintah daerah melakukan penataan terhadap organisasi dan tata kerja daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah provinsi Lampung dan keputusan Gubernur Lampung No. 61 tahun 2001 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas-dinas provinsi Lampung, maka nomenklatur susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Kemudian sejalan dengan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang pedoman

organisasi perangkat daerah, maka pada tahun 2007 organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, bagian XVIII. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 organisasi dan tata kerja dinas pendapatan provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi lampung tahun 2009 bagian VIII.

Kemudian, sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan pemerintah provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 tanggal 21 november 2016 maka nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan berubah dari semula bersama Dinas Pendapatan Daerah Lampung Menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Sesuai dengan peraturan daerah No. 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Lampung tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Kedudukan

- a. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintah daerah bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seseorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Tugas dan Fungsi;

- a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi Lampung dibidang pendapatan berdasarkan otonomi yang menjadi kewenangan.
- b. Tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi:

- 1) Perumus kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar atau pedoman bidang pendpaatan daerah.
- 2) Pelaksana penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi.
- 4) Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah.

- 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendapatan daerah.
- 6) Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi.
- 7) Pelaksanaan pengelolaan system informasi manajemen pendapatan daerah.
- 8) Pembinaan pengendalian, pengawasan, dan koordinasi
- 9) Pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatusahaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka, badan pendapatan daerah provinsi lampung adalah merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator bidang pendapatan daerah, susunan organisasi badan pendapatan daerah provinsi lampung terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pajak
 - a) Sub Bidang Pajak I
 - b) Sub Bidang Pajak II
 - c) Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak

d. Bidang Non-Pajak

- a) Sub Bidang Penerimaan Pusat
- b) Sub Bidang Pembukaan dan Pelaporan
- c) Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

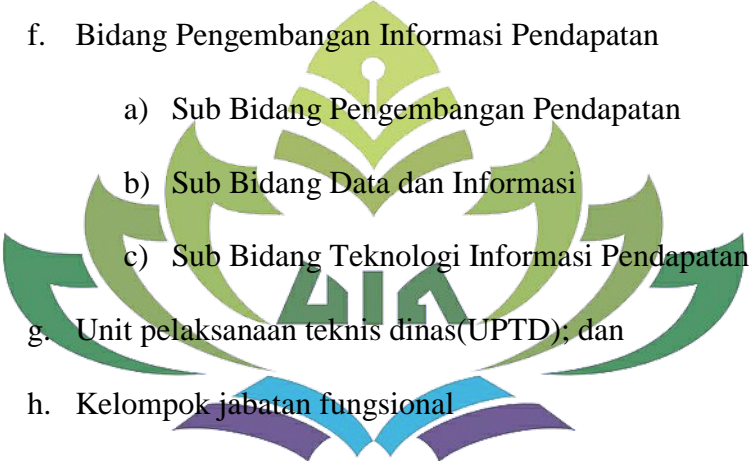
- a) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pajak
- b) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Non-Pajak
- c) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan

- a) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
- b) Sub Bidang Data dan Informasi
- c) Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan

g. Unit pelaksanaan teknis dinas(UPTD); dan

h. Kelompok jabatan fungsional



Untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan pendapatan asli daerah tentu saja perlu di dukung oleh program dan kegiatan unggulan, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah provinsi lampung telah menandatangani MOU kesepakatan bersama kepolisian daerah (POLDA) Lampung untuk meningkatkan kualitas layanan bagi terwujudnya layanan berbasis online, kedepan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP pelayanan publik Samsat terpadu antara mitra kerja badan pendapatan daerah yaitu ditlantas polda lampung, jasa raharja, dan bank lampung. Saat ini layanan unggulan yang ada antara lain:

Tabel 4.1
Layanan Unggulan Samsat

No	SAMSAT	JENIS
1	Samsat Bandar Lampung	Samsat Induk
	Samsat Metro	Samsat Induk
	Samsat Kota Bumi	Samsat Induk
	Samsat Kalianda	Samsat Induk
	Samsat Liwa	Samsat Induk
	Samsat Kota Agung	Samsat Induk
	Samsat Menggala	Samsat Induk
	Samsat Gunung Sugih	Samsat Induk
	Samsat Sukadana	Samsat Induk
	Samsat Belambangan Umpu	Samsat Induk
	Jumlah	10
2	Samsat Pringsewu	Samsat Pembantu
	Samsat Mesuji	Samsat Pembantu
	Samsat Tulang Bawang Barat	Samsat Pembantu
	Samsat Peasawaran	Samsat Pembantu
	Samsat Krui	Samsat Pembantu
	Jumlah	5
3	Samsat Mall Bumi Kedaton	Samsat Mall
	Samsat Mall Kartini	Samsat Mall
	Samsat Mall Chandra	Samsat Mall
	Samsat Natar	Samsat Mall
	Jumlah	4
4	Samsat Container	Samsat Container
	Jumlah	1
5	Samsat Bandar Lampung	Samsat Keliling
	Samsat Tanjung Bintang	Samsat Keliling
	Samsat Jati Agung	Samsat Keliling
	Samsat Padang Cermin	Samsat Keliling
	Samsat Bandar Jaya	Samsat Keliling
	Samsat Sukadana	Samsat Keliling
	Samsat Labuhan Maringgai	Samsat Keliling
	Samsat Fajar Bulan	Samsat Keliling
	Samsat Bukit Kemuning	Samsat Keliling
	Jumlah	9
6	Samsat Drive Thru Balam	Samsat Drive Thru
	Samsat Drive Thru Lamteng	Samsat Drive Thru
	Jumlah	2
	Total	31

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi badan pendapatan daerah provinsi lampung adalah “pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif, serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan.

4. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Untuk meujudkan visi dan misi badan pendapatan daerah provinsi Lampung, maka ditetapkan tujuan, sasaran, dan kebijakan, sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang profesional.
- 3) Peningkatan sinergisitas pengelolaan kekayaan daerah.

Sasaran:

- 1) Peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- 2) Peningkatan sumberdaya dan teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- 3) Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- 2) Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan.
- 3) Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal diatas kepala badan pendapatan daerah provinsi Lampung menjelaskan bahwa startegi kebijakan pengelolaan pendapatan provinsi Lampung diarahkan pada:

- a. Evaluasi/penyesuaian, penyusunan serta sosialisasi produk-produk hukum pendapatan daerah dengan undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.
- b. Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan UPTD pajak di lingkup Badan Pendapatan Daerah provinsi Lampung.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor bersama samsat eksiting dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.
- d. Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui samsat link dan pembentukan kantor-kantor samsat pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan samsat keliling.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari khususnya sektor pajak daerah.
- f. Optimalisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan wajib pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
- g. Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk penyusunan dan bagi hasil baik pemerintah pusat maupun kepada pemerintah kabupaten/kota.
- h. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- i. Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/personal.

- j. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup bidang internal maupun eksternal.
- k. Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 1 sekretariat 4 bidang yaitu: bidang pajak, bidang non pajak, bidang bindal, bidang pengembangan informasi pendapatan (PIP) dan 8 UPTD.

- 
- a. Ketua BAPENDA : Ir. E. Piterdono Hz. S.E., M.M.
 - b. Sekretaris : Drs. A. Razali MS
 - c. Kabid Pajak : Evi Rahmalia S.pi., M.Si.
 - d. Kabid Non Pajak : M. Indra Budiman Duki, S.E., M.M.
 - e. Kabid Bindal : Syamsurialsyah, S.P.M.T.
 - f. Kabid PIP : Yuri Agustina Prima Sari, S.E., M.M.
 - g. KA. UPTD wil I Bandar Lampung
 - h. KA. UPTD wil II Kalianda
 - i. KA. UPTD wil III Metro
 - j. KA. UPTD wil IV Bandar Jaya
 - k. KA. UPTD wil V Mesuji
 - l. KA. UPTD wil VI Kotabumi
 - m. KA. UPTD wil VII Pringsewu

n. KA. UPTD wil VIII Krui

6. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi sederhana. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari berbagai laporan tahunan yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) seluruh data yang diperoleh terdiri dari data target dan realisasi penerimaan program pemutihan PKB, data wajib pajak yang menunggak, data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung.

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Lampung tahun 2012-2017, yaitu:

Tabel 4.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

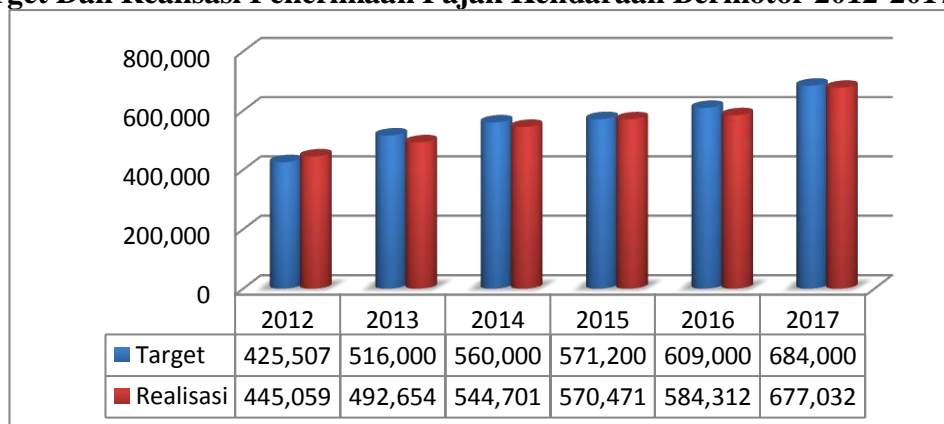
Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2012	425.507.000.000	445.059.044.873	104,59
2013	516.000.000.000	492.654.711.969	95,48
2014	560.000.000.000	544.701.492.841	97,27

2015	571.200.000.000	570.471.497.254	99,87
2016	609.000.000.000	584.213.376.785	95,93
2017	684.000.000.000	677.032.624.066	98,98

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2012-2017

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2012-2017. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.677.032.624.066 dari target sebesar Rp. 684.000.000.000 atau sebesar 98,98 % sehingga terdapat kenaikan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2017 Rp. 92.819.247.281 dari tahun 2016. Capaian realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012-2017 menunjukkan kenaikan yang cukup dimana pada tahun 2012 realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai Rp. 445.059.044.873 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 677.032.624.066. Adapun grafik yang dapat menunjukkan kenaikan yang terjadi dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012-2017 sebagai berikut

Grafik 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2012-2017



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2012-2017

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Lampung tahun 2012-2017, yaitu:

Tabel 4.3
Target Dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
provinsi Lampung 2012-2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
2012	757,000,000,000	698.644.387.397	92,29
2013	813,907,700,000	688.234.992.066	84,56
2014	716,809,000,000	712.469.025.097	99,39
2015	712,000,000,000	599.411.065.623	84,19
2016	688,000,000,000	574.355.265.218	83,48
2017	623,000,000,000	615.251.612.101	98,76

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2012-2017

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012-2017. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2014 yang merupakan penerimaan tertinggi dimana persentase realisasi penerimaan mencapai Rp.712,469,025,097 atau sekitar 99,39 %.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2017 mencapai peringkat tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.759.859.176.654 atau 89.58% dari target sebesar Rp. 3.080.908.289.668. realisasi pendapatan asli daerah di tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kenaikan kecuali untuk di tahun 2015 karena mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya yaitu Rp.

2.247.288.679.813 dan untuk tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.365.097.213.971 dengan persentase realisasinya 86,33%.

Tabel 4.4
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	1.874.304.393.900	1.706.131.403.523	91,03
2013	2.183.413.478.756	1.782.079.943.202	81,62
2014	2.258.133.103.022	2.307.904.100.056	102,20
2015	2.363.789.222.943	2.247.288.679.813	95,07
2016	2.739.699.673.189	2.365.097.213.971	86,33
2017	3.080.908.289.668	2.759.859.176.654	89,58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2012-2017

Berdasarkan tabel di atas, menghasilkan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan begitu pula dengan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan penerimaan dari sektor retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah penerimaannya berfluktuatif, hal inilah yang menyebabkan realisasi PAD tahun 2015 dan 2016 menurun.

B. Analisis Data Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah ada sebelumnya harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas. Alat uji yang digunakan adalah *one sample kolmogrov-smirnov*. Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih


besar dari 0,005. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogrov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	.043
	Absolute	.156
Most Extreme Differences	Positive	.116
	Negative	-.156
Kolmogorov-Smirnov Z		.382
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *one sample kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai residual variable dependen dan independen pada jumlah sample (N) sebesar 6 adalah 0,999. Dengan demikian data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,999 > 0,005$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji multikolieritas

Uji multikolineritas digunakan dalam keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel

independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-12.431	14.815		-.839	.463		
Pkb	1.307	.229	1.038	5.702	.011	.547	1.829
bbnkb	.202	.365	.101	.554	.618	.547	1.829

a. Dependent Variable: pad



Berdasarkan data output diatas diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,01, sementara nilai VIF lebih kecil dari 10.00. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.946	.909	.055	3.109

a. Predictors: (Constant), bbnkb, pkb

b. Dependent Variable: pad

Berdasarkan hasil output diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watshon sebesar 3.109 sedangkan dari tabel dw dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $n=6$ dan $k=1$ diperoleh nilai dL sebesar 0,610 dan dU sebesar 1.400. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai $DL < DW < DU$ dan $DL < (4-DW) < DU$ atau dengan kata lain $0,610 < 3.109 < 1.400$ dan $0,610 < (4-3.109) < 1.400$.

d. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual atau pengamatan yang lain.

Tabel 4.8
Uji heteroskedasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.665	6.858		-.972	.403
1 Pkb	.047	.106	.276	.439	.690
Bbnkb	.200	.169	.744	1.184	.322

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan data ouput diatas diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pajak kendaraan bermotor sebesar 0,690 dan bea balik nama

kendaraan bermotor sebesar 0,322 karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedasitas.

e. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9
Uji Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-12.431	14.815		-.839	.463
1 Pkb	1.307	.229	1.038	5.702	.011
Bbnkb	.202	.365	.101	.554	.618

a. Dependent Variable: pad

Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -12.431 + 1.307 X + .202 X + e$$

Dimana : a (konstanta) = -12.431

X1 = pajak kendaraan bermotor

X2 = bea balik nama kendaraan bermotor

b1 = 1.307

b2 = .202

Dari persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ menunjukkan bahwa $Y = -12.431 + 1.307 X + .202 X + e$. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -12.431 berarti bahwa jika variabel independen

lainnya bernilai nol, maka variabel pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar -12.431 satuan.

- b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan pendapatan asli daerah yaitu $\beta = 1.307$ yang berarti bahwa apabila pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan 1% maka pendapatan asli daerah akan menurun 130,7% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.
- c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor (X2) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan pendapatan asli daerah yaitu $\beta = 202$ yang berarti bahwa apabila pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan 1% maka pendapatan asli daerah akan menurun 20,2% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui peranan variabel independen yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi Lampung. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-12.431	14.815		-.839	.463
Pkb	1.307	.229	1.038	5.702	.011

Bbnkb	.202	.365	.101	.554	.618
a. Dependent Variable: pad					

Berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD di provinsi Lampung bahwa:

H1 : Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.702 dengan sig 0,011. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}(2.015)$ maka H_0 diterima sehingga variabel pajak kendaraan bermotor secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini dibuktikan dengan nilai (sig 0,011 < 0,05).

H2 : Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,554 dengan sig 0,618 Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}(2.015)$ maka H_0 diterima sehingga variabel pajak kendaraan bermotor secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini dibuktikan dengan nilai (sig 0,618 > 0,05).

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor memiliki beta yang paling tinggi yaitu sebesar 0,570 artinya variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel X1 (pajak kendaraan bermotor) dibandingkan dengan variabel X2. Koefisien yang dimiliki oleh variabel X1 memiliki nilai yang

paling besar hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dari variabel pajak kendaraan bermotor maka semakin rendah pendapatan asli daerah.

Dari data diatas disimpulkan bahwa H2 ditolak dan H1 diterima, sehingga pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah

b. Uji F (simultan)

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai probabilitas (*sig*). Hasil uji F dapat dilihat pada hasil output dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.158	2	.079	26.122	.013 ^b
Residual	.009	3	.003		
Total	.167	5			

a. Dependent Variable: pad

b. Predictors: (Constant), bbnkb, pkb

Berdasarkan data output diatas nilai F_{hitung} adalah 26.122 sedangkn pada F_{tabel} diperoleh nilai 6,608 nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa PKB dan BBNNKB secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisiendeterminasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen dalam mendekati variabel-variabel independen yang memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen.

Tabel 4.12
Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.946	.909	.055	3.109

a. Predictors: (Constant), bbnkb, pkb

b. Dependent Variable: pad

Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel diatas, besanya koefisien determinasi atau adjust R^2 adalah 0,909 hal tersebut berarti 90,9% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak kendaraan bermotor dan bea alik nama kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya (100% - 90,9%) adalah 9,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan tersebut diatas.

C. Pembahasan

a. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2017

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Tujuan

dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah daerah khususnya provinsi Lampung untuk berbagai tujuan misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa public, untuk mengatur perekonomian, balas jasa untuk suatu pelayanan dan keamanan, dan juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena, sifatnya mengatur tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. Di dalam pemungutan pajak terdapat hubungan timbale balik yakni antara pemungut pajak yaitu pemerintah dengan wajib pajak atau masyarakat hal ini sesuai dengan teori perjanjian. Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak diwajibkan atas hubungan timbal balik Negara dengan anggota masyarakat. Teori ini memandang bahwa pajak ini di bayarsebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum dngan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara Negara dengan warganya.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam pajak provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kedua pajak

ini merupakan pajak yang dipungut atas peningkatan jumlah kendaraan dimana pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan yang dibutuhkan sebagai sarana transportasi perekonomian masyarakat, dan sebagai akomodasi angkutan barang dan jasa bagi masyarakat.

Sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang yang merupakan provinsi yang berada di ujung pulau sumatera yang merupakan gerbang utama menuju provinsi-provinsi yang ada di pulau sumatera memiliki pendapatan yang tinggi, didukung dengan kendaraan yang hilir mudik setiap harinya guna keperluan bisnis dan lainnya. Dengan masuknya kendaraan dari luar daerah Lampung membuat jumlah kendaraan yang ada di provinsi lampung meningkat, pemerintah provinsi Lampung melihat hal ini pun langsung melakukan pendataan jumlah kendaraan- kendaraan dari dalam provinsi Lampung ataupun kendaraan dari luar daerah. Dimana tujuannya adalah untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari setiap kendaraan yang ada di provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung khususnya data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012-2017 menunjukkan kuantitas wajib pajak PKB terus mengalami peningkatan sedangkan dari kuantitas wajib pajak BBNKB mengalami kenaikan realisasi tertinggi di tahun 2014.

Hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pajak PKB dan BBNKB disebabkan karena kepatuhan wajib pajak yang menunggak masih kurang. Hal ini tentu mempengaruhi penerimaan pajak atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan sebagai kebutuhan sarana transportasi tentunya akan menguntungkan pemerintah, guna peningkatan pendapatan provinsi dan untuk memperlancar tujuan tersebut maka pemerintah melakukan pendataan terhadap kendaraan yang menunggak di seluruh provinsi lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif menunjukkan bahwa kedua variabel yang diteliti yaitu variabel independen (pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh secara simultan hal ini ditunjukkan dengan uji yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD provinsi Lampung. Variabel pajak kendaraan bermotor dengan t_{hitung} sebesar 5.702 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar (2.015) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 > 0,005$). Sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor dengan t_{hitung} sebesar 554 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar

(2.015) $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi lebih besar dari α 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$).

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya sebuah pengaruh yang signifikan dari realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung dimana realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD provinsi Lampung dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Jika pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan lebih diperhatikan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi salah satu pokok pemasukan pajak daerah.

b. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung

Pajak menurut syariah yang secara etimologi dalam bahasa arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Menurut Abdul Qadim Zalum pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang / harta.⁴⁸

⁴⁸ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hlm 138

Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt surah At-Taubah

(9): 29

فَقَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Secara umum, dasar hukum mengenai pajak baik di dalam nash al-qur'an maupun hadist tidak tertuang dengan jelas, karena pajak adalah hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat yang mengacu pada kemaslahatan umat. Di dalam Islam tidak dibenarkan jika harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

Di dalam kitab zallum, terdapat 5 unsur pokok yang merupakan unsure penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*)

3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun) saja dan tidak termasuk non-muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiyai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusu) yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. Harus adanya Nash (al-qur'an dan hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan kaum non-muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Pemungutan pajak sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk dalam setiap system pemungutannya seperti, *jizyah*, *kharaj*, *fa'I*, *ushr* dan *zakat*.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiyai penyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan daerah. Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola pemerintah akan sangat berpengaruh pada pola kemampuan keuangan daerah dalam membiyai dan melakukan pembangunan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Perluasan basis pajak dapat dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik dengan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau hal yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan impor. Selain perluasan pajak dalam peraturan daerah ini juga terdapat perluasan terhadap beberapa objek pajak. Dalam undang-undang No. 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah hanya diberikan wewenang untuk menetapkan tariff pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Untuk menghindari perang tarif antar daerah maka objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor dalam peraturan ini ditetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari representative menjadi preventative. Setiap peraturan daerah tentang pajak sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah setelah disosialisasikan dan dilaksanakan. Terhadap daerah pelanggar kebijakan dibidang pajak daerah yang menentukan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi maka akan mendapatkan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar, Karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Sejalan dengan tidak memberi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada saatnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis mengenai adakah pengaruh positif antara pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Lampung periode tahun 2012-2017. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan kesimpulannya maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu:

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) menunjukkan hasil bahwa variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Lampung tahun 2012-2017. Variabel pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang terjadi di setiap tahunnya.
2. Pada realisasi bea balik nama kendaraan menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel bea balik nama kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung tahun 2012-2017 dikarenakan dipengaruhi oleh jumlah transaksi jual beli kendaraan bekas yang terjadi di lingkungan masyarakat kurang mengalami pertumbuhan yang mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara simultan kedua variabel memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung tahun 2012-2017.

3. Pajak yang di dalam Islam disebut dengan *Dharabah* Yang artinya Diwajibkan Oleh Ulil amri sebagai kewajiban setelah zakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiyaan penyelenggaraan pembangunann daerah secara berkelanjutan. Di dalam penerapan pemungutan pajak Badan pendapatan daerah provinsi lampung senantiasa menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan *muqasid syariah* (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sector pajak.

B. Saran

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksanaan pengawasan pajak daerah perlu diperhatikan,.Mengadakan pendataan dan pengawasan secara berkala terhadap para wajib pajak pemilik kendaraan baik di dalam atau kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di provinsi.Memberikan pelayanan administrasi yang mengutamakan kenyamanan para wajib pajak sehingga dapat menghindari penunggakan pembayaran oleh wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas periode penelitian dan menambah variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan dilakukan pengujian secara lebih optimal baik parsial atau simultan.





Lampiran 5

Tabel Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dan Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2012-2017

Data Realisasi PKB 2012-2017		Data Realisasi BBNKB 2012-2017	
445.059.044.873	26, 8214728	698.644.387.397	27.2724077
492.654.711.969	26. 92307438	688.234.992.066	27.25739617
544.701.492.841	27.02350376	712.469.025.097	27.29200227
570.471.497.254	27.06972904	599.411.065.623	27.11921345
584.213.376.785	27.09353212	574.355.265.218	27.07651397
677.032.624.066	27.2409853	615.251.612.101	27.14529715

Data Realisasi PAD 2012-2017

1.706.131.403.523	28.16524959
1.782.079.943.202	28.20880231
2.307.904.100.056	28.46736091
2.247.288.679.813	28.44074557
2.365.097.213.971	28.49184024
2.759.859.176.654	28.64620077

Lampiran 6

**Data Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menunggak
Per 31 Desember 2017**

No	GolonganKendaraan	Warna TNKB	Jumlah unit
1.	Roda 2	Hitam	1,477,455
		Merah	10,686
		Kuning	-
		Total	1.488,131
	Roda 3	Hitam	3,253
		Merah	401
		Kuning	-
		Total	3,654
	Roda 4	Hitam	60,649
		Merah	1,942
		Kuning	13,772
		Total	76,363

		Grand Total	1,568,148
--	--	--------------------	------------------

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2017

Lampiran 7

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung 2012-2017

Tahun	PKB (X1)	BBNKB (X2)	PAD (Y)
2012	445.059.044.873	698.644.387.397	1.706.131.403.523
2013	492.654.711.969	688.234.992.066	1.782.079.943.202
2014	544.701.492.841	712.469.025.097	2.307.904.100.056
2015	570.471.497.254	599.411.065.623	2.247.288.679.813
2016	584.213.376.785	574.355.265.218	2.365.097.213.971
2017	677.032.624.066	615.251.612.101	2.759.859.176.654

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2017

Lampiran 8

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Jumlah (A+B+ C+ D)
	Pajak daerah (A)	Retribusi Daerah (B)	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (C)	Lain-lain PAD yang sah (D)	
2012	1.465.711.124.584	8.190.683.392	21.270.703.774	210.958.891.774	1.706.131.403.524
2013	1.547.336.214.795	10.070.270.933	25.144.918.795	199.528.538.679	1.782.079.943.203
2014	1.946.452.924.019	9.253.336.152	25.462.864.859	326.734.975.025	2.307.904.100.056
2015	1.963.322.716.952	10.334.830.095	25.715.957.117	247.915.175.650	2.247.288.679.813
2016	2.051.836.519.458	7.009.465.984	26.696.866.021	279.554.362.507	2.365.097.213.971
2017	2.451.339.713.997	7.322.619.001	27.522.159.554	273.674.684.101	2.759.859.176.654

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Lampiran 9

1. Hasil analisis berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-12.431	14.815		-.839	.463
1 Pkb	1.307	.229	1.038	5.702	.011
Bbnkb	.202	.365	.101	.554	.618

a. Dependent Variable: pad

Lampiran 10

2. Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.00
	Std. Deviation		.043
	Absolute		.156
Most Extreme Differences	Positive		.116
	Negative		-.156
Kolmogorov-Smirnov Z			.382
Asymp. Sig. (2-tailed)			.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 11

3. Hasil Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-12.431	14.815		-.839	.463		
1 Pkb	1.307	.229	1.038	5.702	.011	.547	1.829
bbnkb	.202	.365	.101	.554	.618	.547	1.829

a. Dependent Variable: pad

Lampiran 12

4. Hasil Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.946	.909	.055	3.109

a. Predictors: (Constant), bbnkb, pkb

b. Dependent Variable: pad

Lampiran 13

5. Hasil Heteroskedasitas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.665	6.858		-.972	.403
1 Pkb	.047	.106	.276	.439	.690
Bbnkb	.200	.169	.744	1.184	.322

a. Dependent Variable: ABS_RES